

Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Sidrap

Syamsuddin*, Amiruddin, Andi Iqra Pradipta Natsir, Rizky Utami, Haerial, Rakhmat Nurul Prima Nugraha, Aini Indrijawati, Ade Ikhlal Amal Alam, Anissa Aulya Putri, Nurhaliza Magfirah Nindra

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: syamsuddinfeb.uh@gmail.com

Info Artikel Diterima: 01/08/2025 Direvisi: 17/08/2025 Disetujui: 10/09/2025

Abstract. *Transparent, accountable, and efficient financial management is a key prerequisite for realizing quality public health services through Regional Public Service Agencies (BLUD). However, the reality in Sidenreng Rappang Regency (Sidrap) shows that most BLUD units, such as community health centers and hospitals, still face obstacles such as the absence of documented financial SOPs, low understanding of the preparation of Business and Budget Plans (RBA), and limited use of financial information systems. This community service activity aimed to improve the capacity of BLUD financial managers through training and technical assistance in preparing RBAs and SOPs in accordance with regulations, such as Permendagri No. 79 of 2018 and PP No. 23 of 2005. The implementation methods included identifying partner needs, interactive material presentations, group discussions, and the preparation of draft documents by participants. The results of the activity showed that 87% of participants were able to draft an initial RBA and understand the important elements of financial management SOPs. Participants also demonstrated an increased understanding of good governance principles, such as transparency and accountability. The final evaluation confirmed that the applied and case-based training approach was effective in building the technical competence of the apparatus. As a follow-up, it is recommended that further training be developed to cover accrual-based reporting and internal auditing, as well as the integration of digital financial systems. It is hoped that this activity will encourage a more adaptive and sustainable transformation of BLUD financial management and support the improvement of health service quality in Sidrap Regency.*

Keywords: *BLUD, Business plan and budget, Financial SOP, Regional financial management.*

Abstrak. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan publik yang berkualitas melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, realita di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menunjukkan bahwa sebagian besar unit BLUD, seperti puskesmas dan rumah sakit, masih menghadapi kendala seperti belum adanya SOP keuangan yang terdokumentasi, rendahnya pemahaman terhadap penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta terbatasnya pemanfaatan sistem informasi keuangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan BLUD melalui pelatihan dan pendampingan teknis dalam penyusunan RBA dan SOP yang sesuai dengan regulasi, seperti Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan PP No. 23 Tahun 2005. Metode pelaksanaan mencakup identifikasi kebutuhan mitra, pemaparan materi secara interaktif, diskusi kelompok, serta penyusunan draft dokumen oleh peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 87% peserta mampu menyusun draft awal RBA dan memahami elemen penting dalam SOP pengelolaan keuangan. Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi akhir mengonfirmasi bahwa pendekatan pelatihan aplikatif dan berbasis kasus nyata efektif dalam membangun kompetensi teknis aparatur. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan pengembangan pelatihan lanjutan yang mencakup pelaporan berbasis akrual dan audit internal, serta integrasi sistem keuangan digital. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong transformasi pengelolaan keuangan BLUD yang lebih adaptif dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidrap.

Kata Kunci: BLUD, Rencana bisnis dan anggaran, SOP keuangan, Pengelolaan keuangan daerah.

How to Cite: Syamsuddin, S., Amiruddin, A., Natsir, A. I. P., Utami, R., Haerial, H., Nugraha, R. N. P., Indrijawati, A., Alam, A. I. A., Putri, A. A., & Nindra, N. M. (2025). Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Sidrap. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 419-426. <https://doi.org/10.37478/abdika.v5i3.5132>



Copyright (c) 2025 Syamsuddin, Amiruddin, Andi Iqra Pradipta Natsir, Rizky Utami, Haerial, Rakhmat Nurul Prima Nugraha, Aini Indrijawati, Ade Ikhlal Amal Alam, Anissa Aulya Putri, Nurhaliza Magfirah Nindra. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam menjamin keberhasilan organisasi sektor publik, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. BLUD diberikan kewenangan pengelolaan keuangan secara fleksibel agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi kegiatan

operasional tanpa melalui prosedur birokrasi yang kaku (Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005). Melalui fleksibilitas ini, unit pelayanan diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Tantangan tersebut antara lain adalah belum adanya standar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku secara seragam, lemahnya pengendalian internal, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami regulasi teknis dan standar akuntansi pemerintahan (Maduratna, 2024). Hal ini diperparah oleh kurangnya implementasi prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan responsivitas, yang semestinya menjadi pedoman dalam tata kelola keuangan publik (Anggraini, 2024).

Menurut Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh entitas pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, studi oleh Indrijawati et al. (2024) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 54% pengelola keuangan BLUD di tingkat daerah memiliki pemahaman dasar terhadap sistem pelaporan berbasis akrual, sementara sisanya masih menggunakan metode manual. Ketidaksesuaian ini menyebabkan laporan keuangan tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta menyulitkan dalam proses audit dan evaluasi kinerja anggaran.

Tidak hanya itu, rendahnya pemanfaatan sistem informasi keuangan juga menjadi kendala serius. Banyak BLUD belum mengintegrasikan sistem keuangan digital yang dapat mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara real time (Loi et al., 2024). Padahal, penerapan sistem informasi manajemen yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas (Simon et al., 2016).

Lebih lanjut, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) lokal yang sesuai dengan karakteristik masing-masing BLUD menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi pelaksanaan anggaran. Untuk itu, diperlukan pendampingan dalam penyusunan SOP yang kontekstual dan berbasis risiko. Permendagri No. 79 Tahun 2018 juga telah menegaskan pentingnya keberadaan SOP dalam pengelolaan keuangan BLUD, namun pada kenyataannya implementasi di daerah masih minim.

Peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan kajian oleh Simon et al. (2016), kompetensi SDM dan pengendalian internal yang kuat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain pelatihan teknis, dibutuhkan pula pendampingan regulasi untuk membantu aparatur memahami aturan yang terus berkembang. Studi oleh Kurniawan et al. (2023) menemukan bahwa rendahnya kapasitas SDM dalam memahami regulasi dan standar akuntansi pemerintah menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BLUD, yang berujung pada rendahnya kualitas laporan keuangan dan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Dengan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan penyusunan SOP serta RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) menjadi penting. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan teknis aparatur BLUD, tetapi juga mendorong budaya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika dilakukan secara

sistematis dan berkelanjutan, maka tata kelola keuangan BLUD yang efisien dan berintegritas dapat terwujud, mendukung layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengelolaan keuangan BLUD di Kabupaten Sidrap masih mengalami tantangan signifikan, terutama dalam hal standar prosedur yang tidak seragam, lemahnya pengendalian internal, serta rendahnya kapasitas SDM yang memahami regulasi teknis. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan pengabdian masyarakat ini menjadi relevan. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pelatihan, penyusunan SOP, dan meningkatkan pemahaman SDM dalam pengelolaan keuangan BLUD. Kegiatan ini akan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Sidrap.

Beberapa kegiatan pengabdian yang mirip dengan ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pengabdian oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Pemerintah (PPAK) di Universitas Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SDM terkait sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah (Yuliana et al., 2023). Pengabdian ini mencakup pelatihan teknis dan penyusunan SOP pengelolaan keuangan BLUD untuk mengatasi permasalahan serupa yang dihadapi di Kabupaten Sidrap.

Namun, perbedaan mendasar dalam pengabdian ini adalah fokus pada penyusunan SOP yang kontekstual dan berbasis risiko, serta penguatan kapasitas aparatur dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan simulasi penerapan RBA serta pelatihan tentang sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman teknis dengan implementasi sistem keuangan yang modern dan efisien, yang belum banyak diterapkan dalam kegiatan pengabdian sebelumnya.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pemaparan materi secara terstruktur yang berfokus pada penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan BLUD. Tahap pertama diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra melalui diskusi awal bersama pengelola puskesmas dan rumah sakit BLUD di Kabupaten Sidrap untuk mengetahui kondisi eksisting dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan temuan tersebut, tim pengabdian menyusun materi yang disesuaikan dengan regulasi terbaru, khususnya Permendagri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, serta standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Tahap berikutnya adalah pemaparan materi kepada aparatur mitra. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan aplikatif, sehingga mudah dipahami oleh peserta yang memiliki latar belakang beragam. Pemaparan difokuskan pada penjelasan langkah-langkah penyusunan RBA yang sesuai standar serta penyusunan SOP pengelolaan keuangan yang selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan, dilakukan evaluasi kualitatif melalui diskusi, tanya jawab, dan umpan balik langsung dari peserta setelah sesi pemaparan. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan dan kesiapannya dalam menerapkan penyusunan RBA dan SOP di lingkungan kerja masing-masing. Dengan

pendekatan ini, kegiatan diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur BLUD dalam menyusun dokumen keuangan yang terstandar, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak signifikan terhadap penguatan tata kelola keuangan BLUD di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), terutama dalam aspek penyusunan **Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)** serta **Standar Operasional Prosedur (SOP)** pengelolaan keuangan. Berdasarkan kondisi awal yang diidentifikasi melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unit pengelola BLUD, diketahui bahwa sebagian besar puskesmas dan rumah sakit belum memiliki sistem keuangan yang terdokumentasi secara sistematis dan sesuai dengan regulasi, khususnya *Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan PP Nomor 23 Tahun 2005*.

Tahapan awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan pemetaan permasalahan melalui pengumpulan data dokumentasi dan wawancara informal dengan pengelola keuangan BLUD. Temuan menunjukkan bahwa 70% unit BLUD belum memiliki SOP yang tertulis dan hanya 40% yang memahami format RBA sesuai standar berbasis kinerja. Hal ini sejalan dengan temuan Maduratna (2024) yang menekankan lemahnya pengendalian internal sebagai akar permasalahan pengelolaan keuangan BLUD, serta dengan laporan Indrijawati et al. (2024) yang menyatakan bahwa hanya 54% pengelola BLUD memiliki pemahaman terhadap sistem pelaporan berbasis akrual.



Gambar 1. Pemaparan materi pengelolaan keuangan BLUD. Ketua tim pengabdi Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CPMA., memaparkan materi mengenai aspek Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada peserta.

Pada sesi pelatihan yang berlangsung di aula pertemuan, materi disampaikan secara interaktif dan aplikatif dengan pendekatan studi kasus, menyesuaikan dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan prinsip akuntansi pemerintah. Materi difokuskan pada penyusunan RBA berbasis output dan efisiensi biaya, serta penyusunan SOP untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi (Anggraini, 2024). Hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa 82% peserta dapat menyusun draft RBA sederhana dan mengidentifikasi elemen utama dalam SOP pengelolaan keuangan.



Gambar 2. Sesi diskusi kelompok dan konsultasi langsung. Peserta mengajukan pertanyaan atau suatu kasus untuk didiskusikan sekaligus mengkonsultasikan pengalaman yang sedang mereka hadapi.

Sesi diskusi kelompok membuka ruang bagi peserta untuk memetakan hambatan teknis dalam implementasi keuangan BLUD, seperti ketidaksesuaian nomenklatur anggaran, tidak konsistennya pelaporan belanja operasional, serta minimnya pemisahan keuangan berbasis unit layanan. Dalam pendampingan, peserta dibimbing menyusun draft dokumen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan yang disertai asistensi langsung dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kompetensi SDM BLUD (Simon et al., 2016; Loi et al., 2024).



Gambar 3. Dokumentasi foto bersama para pengelola keuangan rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang bersama tim pengabdian setelah kegiatan selesai

Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi layanan kesehatan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang kredibel. Evaluasi akhir melalui form umpan balik dan wawancara menyimpulkan bahwa 87% peserta merasa siap menyusun RBA dan SOP secara mandiri dan berkomitmen untuk menerapkan hasil pelatihan dalam unit kerja masing-masing. Hasil ini mempertegas urgensi penguatan sistem dokumentasi keuangan berbasis SOP sebagai pondasi good governance di sektor kesehatan daerah (Rafli, 2023; Oatley, 2004).

Simpulan dan Tindak Lanjut

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan **Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Standar Operasional Prosedur (SOP)** pengelolaan keuangan bagi BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas pengelola keuangan daerah. Kegiatan ini tidak hanya memenuhi tujuan awal untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi teknis seperti *Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan PP No. 23 Tahun 2005*, tetapi juga menjadi langkah awal pembentukan budaya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien di sektor pelayanan kesehatan. Dari hasil pelatihan, diskusi kelompok, serta asistensi penyusunan dokumen, ditemukan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap struktur RBA berbasis kinerja dan pentingnya SOP yang terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengendalian internal. Sebanyak 87% peserta menyatakan siap menyusun RBA dan SOP secara mandiri, menandakan keberhasilan pendekatan pembelajaran interaktif, aplikatif, dan kontekstual. Temuan ini mengafirmasi urgensi penguatan kompetensi aparatur dan penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diungkapkan oleh Simon et al. (2016) dan Maduratna (2024).

Namun demikian, kegiatan ini juga mengungkap beberapa tantangan penting yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital, masih lemahnya integrasi antar unit kerja, dan minimnya dokumentasi prosedural pada sebagian besar BLUD. Selain itu, kapasitas aparatur dalam pelaporan akrual dan audit internal masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa pelatihan tunggal belum cukup untuk menghasilkan perubahan sistemik tanpa adanya pendampingan berkelanjutan dan penguatan struktur kelembagaan yang mendukung (Indrijawati et al., 2024; Rafli, 2023). Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan agar pemerintah daerah menginisiasi program pelatihan lanjutan dengan cakupan materi yang lebih kompleks, termasuk pelaporan keuangan akrual berbasis SAK, audit internal, serta sistem pelaporan terintegrasi. Pendampingan teknis perlu dilakukan secara berkala dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing unit BLUD. Di samping itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi hasil kegiatan ini ke dalam regulasi teknis lokal, seperti peraturan bupati atau keputusan kepala dinas, guna memastikan keberlanjutan praktik keuangan yang baik.

Dalam jangka panjang, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan institusi layanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan BLUD yang tangguh terhadap dinamika regulasi, transparan dalam pelaksanaan,

dan akuntabel terhadap publik. Keberhasilan reformasi tata kelola keuangan di sektor kesehatan daerah bukan hanya mendukung efisiensi anggaran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Sidrap.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin atas dukungannya yang luar biasa dalam mendanai Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas (PPMU) Program Kemitraan Hibah Internal dengan nomor kontrak 02073/UN4.22/PM.01.01/2025. Tanpa bantuan dan kepercayaan yang diberikan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan dapat berjalan dengan sukses.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pemerintahan*, 12(2), 45–60.
- Darman, H., & Suhartono, M. (2023). Analisis peran teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit di Daerah. *Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen*, 19(2), 45–60.
- Fitria, L., & Hamid, H. (2021). Pengaruh pelatihan akuntansi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Negara*, 25(4), 112–125.
- Hartono, D., & Santoso, S. (2021). Tantangan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual. *Jurnal Kebijakan Dan Ekonomi Pemerintahan*, 22(2), 51–64.
- Hermanto, I., & Tanjung, M. (2020). Evaluasi pengelolaan keuangan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 22(1), 22–37.
- Indrijawati, T., Priyanto, D., & Haryanto, A. (2024). Analisis pemahaman pengelola keuangan BLUD terhadap sistem akuntansi berbasis akrual. *Jurnal Akuntansi Keuangan Daerah*, 16(1), 78–92.
- Kurniawan, F., Nasution, M., & Wibowo, J. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD: Studi kasus pada rumah sakit daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 5(3), 120–135.
- Lestari, E., & Pramudito, W. (2022). Penyusunan SOP dalam pengelolaan keuangan BLUD untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 20(3), 139–153.
- Loi, Y., Chandra, R., & Sugiarto, E. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan BLUD di sektor kesehatan: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Kesehatan*, 21(4), 102–114.
- Maduratna, E. S. (2024). Integrasi pengendalian internal pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. *Jurnal Paradigma*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36089/pgm.v6i1.1785>
- Maduratna, S. (2024). Tantangan pengelolaan keuangan BLUD di daerah terpencil: Kasus Kabupaten Sidrap. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Keuangan*, 8(3), 112–125.

- Mulya, R., & Fitriani, N. (2020). Pengelolaan Anggaran BLUD di Puskesmas dan Rumah Sakit: Kendala dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 88–102.
- Oatley, T. (2004). *International political economy: Interest and institutions in the global economy*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (2005).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (2018).
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (2018).
- Prasetyo, B., & Astuti, L. (2021). Tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen keuangan di rumah sakit BLUD. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Kesehatan*, 23(1), 15–30.
- Rafliis, W. (2023). Pelatihan perancangan SOP pengelolaan dana dan penyajian laporan keuangan berbasis SAK ETAP. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jpmda.v2i1.1015>
- Ridho, M., Susiani, S., Suwandi, S., Hariyadi, H., & Frendiana, Y. (2021). Strategi pengembangan sumber daya aparatur pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.48093/JIASK.V4I1.62>
- Rina, M., & Yulianto, B. (2021). Analisis kualitas laporan keuangan pada BLUD rumah sakit pemerintah: Kasus di Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 104–118.
- Simon, A., Budiarto, D., & Hidayat, R. (2016). Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pemerintah*, 17(1), 50–68.
- Simon, Y., Mas'ud, M., Mahfudnurnajamuddin, M., & Su'un, M. (2016). The role of apparatus competence, internal control system on good governance and the quality of financial statement information. *Researches World*, 7(4), 123–132.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18843/RWJASC/V7I4/14>
- Subhan, A., & Setiawan, E. (2022). Peran SOP dalam meningkatkan pengelolaan keuangan BLUD pada puskesmas di daerah. *Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Daerah*, 13(4), 97–111.
- Suparno, D., & Hamzah, U. (2022). Evaluasi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan BLUD pada Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 52–66.
- Suryanto, R., & Widiyanto, J. (2023). Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan BLUD: Studi kasus di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 74–89.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (2004).
- Wijayanti, T., & Andini, F. (2022). Pengelolaan Keuangan BLUD di Puskesmas: Evaluasi atas efektivitas penggunaan anggaran kesehatan. *Jurnal Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan*, 19(1), 37–51.
- Yuliana, N., Fadilah, R., & Rizal, A. (2023). Pelatihan akuntansi berbasis akrual bagi pengelola keuangan daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(2), 60–73.